

LITERATURE REVIEW PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Fitri Nurlaili¹

fitrinurlaili@unbaja.ac.id

Yusina Fadla Ilmi²

yusinafadlailmi@unbaja.ac.id

Emilia Maharani³

maharaniemili66@gmail.com

Universitas Banten Jaya¹⁻³

ABSTRACT

A regional financial report: a form of accountability for those who wield power over regional financial management. Financial reports are equally important because they are a mechanism for local governments to account for the proper management of public resources. IST Resources Institute — Transparency and Accountability of Government Financial Reports. There are two hypotheses tested significantly in the first hypothesis that transparency can improve the quality of financial reports, the effect of transparency here is that financial management is transparent will produce better results. Ans. Another hypothesis is that accountability has high test effect on financial reporting in which accurate reporting practices go with an accountable financial practices. It was concluded that this is an evidence that highlights the significance of transparency and accountability that must be applied in the financial reporting process to foster better financial governance in local governments which will positively influence public service delivery and restore the public confidence on the Government as an institution.

Keywords: Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRAK

Laporan keuangan daerah adalah wujud pertanggung jawaban dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas bagi pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya publik. Penelitian ini merumuskan hipotesis dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan laporan keuangan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah dan memastikan bahwa publik memiliki kepercayaan terhadap pelaporan tersebut. Terdapat dua hipotesis utama, hipotesis pertama menguji secara signifikan bahwa transparansi akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, disini pengaruh transparansi adalah pengelolaan keuangan yang bertransparansi menghasilkan hasil yang lebih baik. Hipotesis lainnya adalah akuntabilitas memiliki pengaruh uji yang signifikan pada pelaporan keuangan, dengan kata lain, pelaporan yang akurat bergabung dalam praktik keuangan yang akuntabel. Disimpulkan bahwa ini membuktikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam proses pelaporan keuangan demi perbaikan governansi keuangan secara keseluruhan di pemerintah daerah yang mana akan mengarah pada peningkatan pengiriman layanan publik dan membantu masyarakat untuk kembali mempercayai Pemerintah sebagai lembaga.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transpransi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Adisasmita (2011) Transparansi pemerintah merupakan isu krusial. Dalam sistem pemerintahan demokratis, akuntabilitas kepada publik sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemerintahan yang transparan, guna meningkatkan keterbukaan dan akses terhadap data anggaran. Keterbukaan pemerintah yang lebih besar sangat dibutuhkan di lembaga-lembaga untuk mengaudit, mencegah korupsi dan penyalahgunaan sumber daya energi publik yang menimbulkan masalah. Pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana masyarakat, sehingga berhasil tidaknya pengelolaan anggaran sangat bergantung pada instansi pemerintah daerah yang melaksanakannya (Yudistira & Rohman, 2022a).

Penggunaan anggaran dilakukan melalui pelatihan pemodal sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan. Akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggapan pemerintah publik terhadap tingkat kinerjanya (Pina et al., 2010). Isu terhadap kinerja pemerintah daerah semakin menyita perhatian masyarakat, mengingat minimnya hasil yang belum dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintah mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dalam rangka pelaksanaan konsep otonomi daerah. Di tingkat daerah khususnya transparansi keuangan berperan penting dalam efesinsi anggran, dimana kinerja Lembaga sangat bergantung pada pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Untuk memastikan mekanisme akuntabilitas berfungsi secara efektif, diperlukan manajemen kinerja yang efektif. Penerapan berbagai peraturan terkait akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di harapkan dapat menciptakan tata kelola

daerah yang lebih baik, yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. (Ni'mah et al., 2020a)

Halim 2020 menyatakan implementasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan untuk mengawasi dan memastikan bahwa tugas pemerintah di pusat dan di daerah berjalan sama dan sesuai pemerintah beroperasi dengan baik. (Ni'mah et al., 2020b). Salah satu tugas seluruh pemerintahan adalah menyusun laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah adalah laporan dalam bentuk apapun yang mempresentasikan posisi, kinerja keuangan dan penghasilan dan biaya lain-lain pemerintahan tersebut dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintahan terkait pelaksanaan pemerintahan daerah. Cara Penyusunan laporan keuangan. Dalam penjelasan SAP 019 tentang cara Penyusunan Laporan Keuangan dengan mengungkapkan tujuan khusus dari penyajian pelaporan keuangan pemerintahan daerah adalah untuk melaporkan dan menyajikan data pengelolaan keuangan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, juga bukti akuntabilitas pemerintah daerah terhadap sumber daya keuangan yang pembelian dan penggunaannya diamanatkan kepada entitas. (Yudistira & Rohman, 2022b).

Setelah peraturan ini diberlakukan, siapa pun yang meminta informasi keuangan publik dapat dengan mudah, cepat, efektif, dan efisien mendapatkan informasi tersebut melalui internet dengan biaya yang terjangkau. (Rahman et al., 2013). Pemerintah daerah dapat memberikan informasi manajemen keuangan melalui pelaporan keuangan online, yang mudah dapat di akses dan efektif (Pina et al., 2010). Penyelenggaraan penganggaran elektronik

merupakan upaya konkrit yang bertujuan untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, yang memenuhi syarat kecepatan dan keandalan serta disusun sesuai dengan ketentuan pemerintahan yang berlaku umum. Pelaporan keuangan melalui internet adalah salah satu Upaya pemerintah untuk menyampaikan informasi keuangan yang sangat mudah untuk di akses dan efektif.(Alan K. Styles, 2007).

Pemerintah daerah harus terus memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka. Semua komponen teknis, termasuk peraturan, institusi, sistem informasi keuangan, dan peningkatan sumber daya manusia, dikelola oleh pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah telah membuat awal neraca daerah sejak awal tahun 2002 dengan mengacu pada Pedoman SAKD, yang dibuat oleh Tim Pokja SK Menkeu 355/2001 dan Kepmendagri No: 29/2002, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik internasional (Maulana & Lubis, 2020a).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi atau agency theory adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen perusahaan (agen). Teori ini merupakan konsep mendasar dalam keuangan dan ekonomi. Teori agensi menjelaskan bahwa pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen dapat menyebabkan masalah agensi. Hal ini karena masing-masing pihak akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan sendiri. Kondisi yang sering muncul di teori ini yaitu konflik keagenan yang terjadi Ketika kepentingan dan tujuan pemilik dan pihak manajemen berbeda, selain itu sering adanya perselisihan yang timbul karena

perbedaan tujuan dan penghindaran resiko.

Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi

Transparansi adalah salah satu aspek terpenting dari kualitas laporan keuangan. Prinsip ini didasarkan pada penyediaan informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan mana pun. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi didefinisikan sebagai prinsip keterbukaan dan kejujuran pemerintah terkait tanggung jawab publik untuk akun, yang dirumuskan melalui laporan sistematis yang dikenal sebagai laporan pertanggungjawaban. (Octavia Dwi Sagita Sari & M. Taufiq Hidayat, 2020)

Transparansi mengacu pada prinsip pemerintahan yang baik yang terbuka kepada rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini berarti bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks akuntabilitas beroperasi tanpa adanya kerahasiaan atau tujuan tersembunyi, serta memastikan semua informasi disampaikan secara lengkap dan tidak ada data relevan yang disembunyikan terkait masalah tertentu. Bapenas menegaskan bahwa Transparansi merupakan prinsip yang memastikan setiap orang memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, termasuk kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai.(Sari, 2012).

Mardiasmo (2018) mengemukakan Transparansi mencakup memberikan informasi, berita, mekanisme, prosedur, data, dan fakta kepada pihak yang memerlukan informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan atau memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan informasi tentang proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya. Kedua, menyampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas dan kinerja finansial, dan ketiga, memberikan hak kepada setiap orang untuk mengakses data publik yang sudah ada. (Lubis Eliza Handayani et al., 2024)

Diartikan bahwa pemerintah bersikap transparan jika memberikan informasi melalui cara-cara tertentu kepada kelompok publik terkait dengan pengelolaan sumber daya keuangan mereka. Ini mencakup kebutuhan pemerintah untuk menyediakan laporan keuangan publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak kelompok publik, Dalam konteks bagian ini kelompok masyarakat tanpa syarat untuk mengetahui informasi tentang manajemen keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencerminkan bagian bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas pengelolaan keuangannya melalui cara terbuka dan jujur kepada publik. Ini pertama-tama mencakup penyampaian laporan keuangan pemerintah, tetapi juga saluran, dan suatu asumsi yang melekat pada masyarakat bahwa ia berhak mengetahui informasi ini. Berbagai aspek dari entitas pemerintahan yang bersifat terbuka adalah elemen integral bagi negara itu untuk dianggap transparan. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, aspek mutlak. (Yuliani, 2017)

Akuntabilitas

Menurut jurnal (Laila Farika et al., 2023) Menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mendefinisikan akuntabilitas kinerja sebagai tanggung jawab yang diemban oleh instansi pemerintah dan terjadi atas keberhasilan atau kegagalan melaksanakan program atau kegiatan pada

setiap level dalam sebuah organisasi berdasarkan mandat yang disediakan oleh para stakeholder. Akuntabilitas di sisi lain mengacu kepada prinsip pertanggungjawaban publik, yaitu, semua soal penganggaran keuangan, perencanaan, penyiapan, hingga pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan demikian akuntabilitas, merupakan kewajiban individu atau kelompok dari pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya publik dan sumber daya terkait untuk mengatasi masalah yang tumbuh dengan cara yang menyebabkan mereka bertanggung jawab dalam hal itu. Akuntabilitas erat terkait dengan mekanisme kontrol, bermanifestasi sebagai upaya kontrol dan pemeriksaan guna mencapai hasil pelayanan publik dan membenarkannya dengan cara yang jelas. (Pamungkas et al., 2023)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan yang mengumpulkan informasi keuangan pemerintah daerah selama periode yang ditetapkan. Salah satu cara pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat adalah LKPD. Posisi keuangan, transaksi pemerintah daerah, nilai sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dan kepatuhan terhadap undang-undang adalah semua topik yang dibahas dalam LKPD. LKPD dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPD berfungsi untuk membantu dalam pengambilan keputusan, menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah, menilai kinerja pemerintah daerah, dan menilai kemampuan pemerintah daerah untuk memuat operasinya. Laporan keuangan

pemerintah, yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30–32), menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, serta gubernur, bupati, dan walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar akuntansi pemerintahan yang digunakan.(Mentari & Kurniawati, 2024)

Pengaruh Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Anggaran adalah pernyataan yang menggambarkan perkiraan apa yang akan dicapai selama suatu waktu tertentu dan ditulis dalam bentuk uang. Anggaran pemerintah daerah dikelola dengan prinsip transparansi. Sangat penting untuk menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah dan mencegah perlindungan kekuasaan oleh elit lokal. Akses publik ke dokumen anggaran sangatlah penting. Hood (2007) Pertama, ada konsep tentang transparansi dalam beberapa aspek. Memperluas berdasarkan Overdevest dan time bahwa transparansi berasal dari transparansi acara atau kejadian dan transparansi proses namun, dalam konteks telematika, bentuk transparansi yang perlu diperhitungkan adalah transparansi waktu nyata dan transparansi retrospektif.(Maulana & Lubis, 2020b)

H1 : Transparansi Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam jurnal (Budiman Novi Fiona Samantha et al., 2024) Mengemukakan Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bentuk pertanggung jawaban

pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus diaudit atau diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan melalui sistem akuntansi harus didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik , yang berarti pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang jelas dan akuntabel, sehingga orang yang membaca laporan keuangan dapat melihat bagaimana pemerintah daerah berhasil. Laporan keuangan pemerintah harus dibuat dengan cepat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintah. Akuntabilitas mengacu pada pengelolaan sumber daya dan pengelolaan sumber daya yang diberikan kepada entitas. Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan yang andal, relevan, dapat dipahami dan di bandingkan.

H2: Akuntabilitas Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolan Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kinerja keuangan adalah penilaian kondisi keuangan suatu entitas dalam satu periode tertentu. Kinerja keuangan merupakan tolak ukur atau gambaran dari keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola asetnya. Sumarsono menyatakan Pemerintah daerah membutuhkan sistem pengelolaan keuangan untuk mengelola pemerintah dan mengukur kinerjanya. Hal ini dilakukan untuk

menciptakan kejelasan hukum dan mengurangi kemungkinan lingkungan dan penyimpangan. (Purnama & Nadirsyah, 2016)

Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010) Kinerja keuangan adalah suatu hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan kualitas anggaran yang telah diukur. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja memuat “penilaian kinerja yang berfungsi sebagai pembuktian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan atau serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan, untuk mencapai target dan tujuan organisasi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. (Nasution, 2019a)

H3: Kinerja Keuangan Mempengaruhi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dimana informasi dikumpulkan melalui analisis literatur akademik. Proses yang digunakan pencarian untuk menemukan sumber yang relevan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan mesin pencari (Google Chrome) di situs web berikut: <http://sinta.ristekbrin.go.id> dan <http://scholar.google.com> untuk artikel berjudul "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", yang memiliki topik yang sama dengan topik publikasi selama

sepuluh tahun terakhir (Auliya Siwi Nugrahani, 2023).

Adapun jurnal yang menjadi perbandingan di penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Nama / Tahun	Judul	Hasil
1.	(Rama, et al, 2021)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi.	Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: Baik transparansi maupun akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Sifat Amanah tidak mempengaruhi transparansi maupun akuntabilitas. Jadi, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan keuangan desa yang baik tetapi kepercayaan tidak berfungsi sebagai moderator. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah sampel dan lokasinya terbatas, dan menyarankan bahwa lebih banyak perhatian harus diberikan pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2.	(Zubaidah, et al., 2023)	Pengaruh Akuntabilitas dan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman.	Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sedangkan akuntabilitas tidak memiliki dampak yang signifikan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih fokus pada meningkatkan transparansi laporan keuangan untuk meningkatkan pengambilan keputusan,

			pengawasan, dan kepercayaan publik.				berpengaruh secara bersamaan, dengan 74,2% dari variasi kinerja keuangan disebabkan oleh variabel ketiga tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabilitas sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Mereka juga menekankan pentingnya memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek transparansi untuk mencapai hasil yang lebih baik .
3.	(Yudistira & Rohman, 2022)	Pengaruh Krakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan 2019).	Hasil dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas publik meningkat secara signifikan sebagai hasil audit yang efektif. Audit kinerja meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dengan menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasional sektor publik. Pengawasan fungsional juga membantu memperkuat hubungan antara hasil audit dan akuntabilitas publik. Studi ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam tata kelola, terutama dalam konteks manajemen layanan publik di Indonesia yang sedang berkembang. Jadi, untuk meningkatkan akuntabilitas publik, audit dan pengawasan fungsional harus berjalan dengan baik.	5.	(Dewi, et al, 2024)	Literatur review transparansi dan akuntabilitas di Indonesia selama satu dekade: Studi bibliometric	Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mencapai tata kelola yang baik dan mencegah korupsi, di mana partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin kinerja pemerintah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa, pada tahun 2021, pemerintah Indonesia menerima skor efektivitas 65,38 dari 100, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam praktik tata kelola.
4.	(Nasution, 2019)	Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikaji dalam jurnal ini. Digunakan survei yang melibatkan 68 orang dari Organisasi Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: Pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas mempengaruhi kinerja keuangan secara positif dan signifikan, sedangkan transparansi mempengaruhi kinerja keuangan secara negatif. Ketiga variabel tersebut	6.	(Farah Faadillah Herindran Ingram & Indrawati Yuhertian a 2021)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Literatur Review	Jurnal ini melakukan pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah daerah di Indonesia melalui tinjauan literatur sistematis yang mencakup 28 jurnal akademik. Temuan menunjukkan bahwa kualitas laporan dipengaruhi oleh sembilan faktor utama, dengan kompetensi sumber daya manusia muncul

			sebagai yang paling signifikan. Faktor tambahan yang memberikan pengaruh termasuk teknologi informasi, akuntabilitas, transparansi, kualitas audit, dan kerangka kerja dan prosedur akuntansi. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi yang efektif dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.				Untuk mengurangi konteks dana desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
7.	(Ria Herlina, et al, 2021)	Pengaruh Transaksi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi.	Secara keseluruhan, penelitian ini menjelaskan bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem pengendalian internal membantu transparansi dan sistem akuntansi, tetapi tidak kompeten.	9.	(Kurniawati & Sadeli, 2021)	Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas publik memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Bandung. Dengan menggunakan sampel 30 responden dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), analisis regresi menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berkontribusi sebesar 28.8% dan transparansi sebesar 22.7% terhadap kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan, kedua faktor ini menjelaskan 51.5% varians dalam kualitas laporan keuangan, sementara 48.5% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
8.	(Dewi Indriasih, et al, 2022)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa, transparansi, dan kemudahan akses ke laporan keuangan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal. Semua variabel independen mempengaruhi akuntabilitas secara bersamaan, dengan variabel-variabel ini bertanggung jawab atas 81,5 % dari variasi akuntabilitas.	10.	(Andika Subandra, et al 2022)	Pengaruh Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.	Dari hasil jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan nilai signifikansi 0,785, maka transparansi tidak signifikan mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi variabel pengelolaan keuangan desa

			tersebut. Ketiga independen variabel tersebut secara bersama telah secara signifikan mempengaruhi variabel dependen pengelolaan keuangan desa. Dengan koefisien determinan dari R^2 , ketiga variabel tersebut dapat menjelaskan 75,5% perbedaan atas pengelolaan keuangan desa. Jika ingin memperbaiki pengelolaan keuangan pendapatan desa, pemerintah desa diarahkan agar menaikkan indikator transparansi, akuntabilitas, beserta partisipasi masyarakat.
--	--	--	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Transparansi dan Akuntabilitas :

Prinsip utama pemerintahan yang dikenal adalah memastikan transparansi bahwa informasi tentang pengelolaan sumber daya masyarakat harus transparan. Hal ini dicapai melalui laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan dapat diakses secara publik. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat melihat bagaimana anggaran digunakan dan menilai apakah dana publik digunakan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Transparansi membantu mencegah korupsi dan menyembunyikan izin karena publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat melihat secara langsung keputusan dan pengeluaran pemerintah.

Sementara itu, Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan. Laporan keuangan yang diaudit oleh BPK adalah wujud akuntabilitas pemerintah daerah. Keterbukaan dalam administrasi laporan keuangan memfasilitasi akses publik ke data keuangan pemerintah. Prinsip ini didukung oleh banyak kerangka peraturan, termasuk PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Akuntabilitas diartikulasikan sebagai tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penjelasan rinci tentang pengelolaan sumber daya publik kepada warga negara. Konsep akuntabilitas ini dimanifestasikan melalui pengungkapan keuangan yang mematuhi standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan. Yang mana penilaian laporan keuangan badan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK RI, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Tujuan utama dari audit adalah untuk memastikan kebenaran dan keandalan data yang disajikan.

Audit laporan keuangan oleh BPK merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan penilaian atas laporan keuangan badan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil audit tidak hanya menjadi alat evaluasi bagi pemerintah, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam menilai kinerja pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Hasil

1. Transparansi dan Akuntabilitas Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari ulasan literatur yang sudah di review dalam 10 jurnal di atas, masing-masing membahas Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa:

Hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu transparansi secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan Hal ini menunjukkan bahwa semakin terbuka aktivitas pengelolaan keuangan, semakin baik hasil yang dihasilkan. Hal ini serupa dengan konsep transparansi, yang berarti bahwa pemerintah membuat masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang pengelolaan sumber daya masyarakat bagi mereka yang mengancam. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memberikan informasi yang jelas tentang tindakan yang telah dilakukan.(Septian et al., 2022).

Hipotesis kedua dari penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari Analisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukan bahwa laporan yang dibuat akan lebih akurat jika pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel. Karena akuntabilitas adalah tanggung jawab orang yang dipercaya untuk mengelola sumber daya public. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan(Septian et al., 2022).

2. Kinerja Keuangan Mempengaruhi Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah

Hasil ketiga dari Hipotesis di penelitian ini menyatakan bahwa Kinerja keuangan yang baik mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan relevansi laporan keuangan. Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, mengoptimalkan efisiensi anggaran, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang unggul. Dengan menjadi transparan, informasi keuangan menjadi mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan dan pengawasan. Akuntabilitas mengurangi risiko anggaran dengan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dikelola. Selain itu, kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan sistem yang lebih canggih untuk pengumpulan, pengolahan , dan data keuangan secara real-time, yang membuat pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan menjadi lebih mudah. Sumber daya manusia yang memadai juga membantu mengelola dan menyajikan laporan keuangan secara profesional dan akurat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan Transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas sangat penting karena membuat mereka bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk

memastikan bahwa mereka benar, dapat dihubungi, dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Transparansi dalam laporan keuangan sangat penting karena membuat informasi keuangan pemerintah lebih mudah bagi masyarakat untuk melihat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Faktor Pendukung dan Tata Kelola Keuangan yang Baik adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Subandra, et, A. (2022). *JAAB : Jurnal of Applied Accounting And Business*. 4(2).
- Anggrayeni, et, A. (2021). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan sifat amanah sebagai variabel moderasi 1,2,3*. 2, 179–193.
- Auliya Siwi Nugrahani. (2023). Literatur Review: Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai Moderator. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 131–138. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1758>
- Budiman Novi Fiona Samantha, Manossoh Hendrik, & Heince R.N Wokas. (2024). Analisis Pemanfaatan Aplikasi FMIS (Financial Management Information System) Dalam Memenuhi akuntabilitas Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA*, 12(3), 10.
- Dewi, et, A. (2024). *Literatur review trasparansi dan akuntabilitas di Indonesia selama satu dekade : Studi bibliometric*. 6(06), 207–216.
- Dinda Febriana, et, A. (2022). *Pengaruh Komitmen Organisasi , Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Pemerintah Desa , Transparansi , dan Aksesibilitas Laporan*. 3(4), 972–981. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Farah Faadillah Herindraningrum, I. Y. (2021). 1 , 2 1, 2. 12(2), 157–171.
- Kurniawati, A., & Sadeli, D. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 2(2), 18–24.
- Laila Farika, Muhamad Albahi, & Mawardi Muhammad Saleh. (2023). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru Perpsketif Ekonomi Syariah*. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 1017–1030. <https://jom.uin->
- Lubis Eliza Handayani, Siahaan Karin Sarah Angelina, Lubis Putri Kemala Dewi, & Bakara Sarah. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Kantor Camat Medan Tembung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 53–66. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.106>
- Maulana, Z., & Lubis, N. K. (2020a). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4 Nomor 1(2655-187X), 1–14.
- Maulana, Z., & Lubis, N. K. (2020b). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4 Nomor 1(2655-187X), 1–14.
- Mentari, B., & Kurniawati, L. (2024). the Influence of Internal Audit and Human Resource Competence on the Quality of Financial Reports of the Local Government in Central Java (2018-

- 2022) Pengaruh Audit Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemer. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.
- Nasution, D. A. D. (2019a). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nasution, D. A. D. (2019b). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Ni'mah, R. S., Kartika, R., & Yuliah, Y. (2020a). Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Efektivitas Anggaran Pada Kantor Upt Dppkd Pandeglang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 143–155. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.3264>
- Ni'mah, R. S., Kartika, R., & Yuliah, Y. (2020b). Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Efektivitas Anggaran Pada Kantor Upt Dppkd Pandeglang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 143–155. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.3264>
- Octavia Dwi Sagita Sari, & M. Taufiq Hidayat. (2020). *Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kota Surabaya*. 9, 1–11.
- Pamungkas, G., Puri, P. A., & Yanto, D. (2023). Pengaruh Audit Internal dan Akuntabilitas Sektor Publik terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pontang Tahun 2022. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3521–3533. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5149>
- Purnama, F., & Nadirsyah. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 1–15.
- Ria Herlina, et, A. (2021). *Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal Control System*. 4, 419–433.
- Sari, D. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis*, 718–727.
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2022a). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2022b). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>